OMBUDSMAN BENGKULU GELAR SOSIALISASI PENILAIAN KEPATUHAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2024

Jum'at, 14 Juni 2024 - bengkulu

Bengkulu - Menjelang Penilaian Kepatuhan Penyelenggara Pelayanan Publik Tahun 2024, Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Bengkulu mengadakan sosialisasi di Hotel Mercure Bengkulu pada Kamis (13/6/2024). Kegiatan ini diikuti oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kepolisian Resor, dan Badan Pertanahan se-Provinsi Bengkulu. Kegiatan juga dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting.

Tujuan utama dari sosialisasi ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Provinsi Bengkulu dengan memastikan kepatuhan terhadap standar mutu yang telah ditetapkan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kepuasan masyarakat, mendorong akuntabilitas, dan meningkatkan transparansi dalam pelayanan publik.

Kepala Pencegahan Ombudsman RI Bengkulu Ade Bardiyanto dalam paparannya menyampaikan bahwa, tahun ini Ombudsman RI akan melakukan penilaian dengan melihat empat dimensi yaitu dimensi input, dimensi proses, dimensi output, dan pengelolaan pengaduan dengan metode wawancara, observasi dan studi dokumen. Diharapkan agar semua instansi yg menjadi lokus penilaian agar mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik dan serius. Selain itu, Ombudsman Babel juga mendorong kepada pemerintah pusat untuk memberikan penghargaan yang sepadan dengan upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan pelayanan publik yang baik.

Sementara itu, Gubernur Bengkulu H. Rohidin Mersyah mengapresiasi kinerja Ombudsman Bengkulu dimana sejak tahun 2017 telah memberikan bimbingan kepada instansi pemerintah untuk memberikan pelayanan publik dengan standar mutu yang baik.

Turut hadir dalam acara,Gubernur Provinsi Bengkulu H. Rohidin Mersyah, Pjs. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Bengkulu Jaka Andhika, Kepala Kanwil ATR/BPN Bengkulu Yusuf Abdul Aziz, Kapolda Bengkulu Irjen Pol Drs. H. Armed Wijaya, Direktur RSUD M.Yunus, dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu Zulman Zuhri Amran. Selain itu, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kepolisian Resor, dan Badan Pertanahan se-Provinsi Bengkulu juga turut berpartisipasi.